



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Kesimpulan tentang Pengembangan Perusahaan yang Berkesinambungan

Makalah Kerja

Kesimpulan tentang Pengembangan Perusahaan yang Berkesinambungan

Konferensi ILO, Juni 2007



Organisasi Perburuhan Internasional

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2008
Cetakan Pertama 2008

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui e-mail: pubdroit@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+ 44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+ 1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-821865-7 (print)
ISBN 978-92-2-821866-4 (web pdf)

ILO

Kesimpulan tentang Pengembangan Perusahaan yang Berkesinambungan / Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta:
ILO, 2008
23 hal

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises* (ISBN: 978-92-2-120131-1).

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland (e-mail: pubvente@ilo.org) ; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia (e-mail: jakarta@ilo.org). Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas atau melalui email.

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Prakata

Pengembangan yang berkesinambungan merupakan kerangka kerja yang paling disetujui secara luas dalam diskusi-diskusi baik di tingkat nasional maupun internasional terkait masalah pembangunan. Komitmen untuk mempromosikan integrasi ketiga komponen pengembangan yang berkesinambungan yakni komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan, telah dibahas dalam beberapa forum internasional, termasuk dalam Pertemuan Johannesburg tentang Pengembangan yang Berkesinambungan pada September 2002. Walaupun beberapa kemajuan telah dicapai, namun pelaksanaan secara efektif atas sistem pendekatan yang seimbang terhadap pengembangan yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun internasional, investasi sektor swasta serta perkembangan usaha, tetap menjadi tantangan besar. Kendati begitu kini sudah muncul kesadaran secara luas serta kepedulian publik yang lebih tinggi terhadap motor penggerak utama dari kelangsungan, dimensi sosial dan lingkungan, sifat dan dampak dari perubahan iklim, peran pemerintah, perusahaan swasta, serikat pekerja dan para aktor lainnya.

Seperti pernah saya sampaikan dalam Laporan Konferensi ILO 2007 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pengembangan yang Berkesinambungan di ILO, kita perlu menetapkan visi pengembangan yang berkesinambungan sebagai paradigma luas, di mana Agenda Pekerjaan yang Layak dapat memberikan kontribusi atas kemajuan dan pembangunan. Bagian penting dari Agenda Pekerjaan yang Layak ini adalah promosi pekerjaan yang lengkap, produktif dan tentunya sektor swasta, sebagai mesin pertumbuhan yang memainkan peranan penting serta sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, diskusi tentang pengembangan perusahaan yang berkesinambungan dalam Konferensi ILO 2007, sudah tepat pada waktunya. Kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari diskusi ini memberi kontribusi penting yang disepakati konstituensi tripartit ILO yaitu pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja, tentang bagaimana mempromosikan pengembangan usaha dengan cara yang dapat menyelaraskan pertumbuhan perusahaan dengan tujuan pengembangan berkesinambungan serta penciptaan lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak.

Mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan juga menjadi upaya untuk memperkuat lembaga dan sistem tata kelola yang mendukung perusahaan—karena pasar yang kuat dan efisien membutuhkan lembaga yang kuat dan efektif. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memastikan sumber daya manusia, keuangan dan alam yang dikombinasikan secara adil dan efisien untuk mencapai tingkat inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini tentunya membutuhkan bentuk-bentuk kerja sama baru antara pemerintah, kalangan bisnis, tenaga kerja dan masyarakat umum untuk memastikan mutu kehidupan dan pekerjaan yang ada sekarang dan di masa mendatang dapat dioptimalkan seraya menjaga kelangsungan bumi ini.

Seperti diperlihatkan dalam kesimpulan-kesimpulan ini, ILO dapat memberikan kontribusi penting mendorong pendekatan terpadu dalam mengembangkan usaha yang berkesinambungan. Karena

di tempat kerjalah dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Di samping itu, untuk memastikan kemajuan Agenda Pekerjaan yang Layak, kita perlu menempatkannya secara lebih jelas dalam suatu kerangka pengembangan yang berkesinambungan. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari diskusi tripartit, memberikan panduan tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan yang berkesinambungan, praktik-praktik perusahaan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan serta peran Kantor ILO beserta konstituennya untuk mencapai target melalui pengembangan perusahaan yang berkesinambungan.

Saya percaya kesimpulan-kesimpulan ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan sebagai visi untuk menyusun kebijakan-kebijakan tentang pengembangan usaha, bagi para pengusaha untuk mengembangkan strategi yang kompetitif, dan bagi para pekerja untuk memasukkan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berperspektif di dunia kerja. Kesimpulan-kesimpulan ini tentu saja juga akan membantu tugas ILO selama beberapa tahun mendatang termasuk membantu mengembangkan hubungan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pekerjaan sistem PBB secara keseluruhan dan lembaga-lembaga Bretton Woods, dengan memberikan pengakuan yang lebih tinggi kepada nilai tripartisme dan sentralitas pekerjaan yang layak untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Juan Somavia

Direktur Jenderal ILO

Kata Pengantar

Konferensi ILO Juni 2007 membahas pengembangan perusahaan yang berkesinambungan. Tantangan yang disimpulkan dalam konferensi ini adalah menggelar diskusi di tingkat internasional tentang peran sektor swasta dan perusahaan yang berkesinambungan dalam pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Tujuannya tentunya untuk menilai relevansi dan implikasi kecenderungan yang ada terhadap pelaksanaan Agenda Pekerjaan yang Layak dan memberi panduan kepada Kantor ILO tentang tugasnya di bidang ini.

Kesimpulan-kesimpulan dari diskusi tentang pengembangan perusahaan yang berkesinambungan yang diterbitkan dalam publikasi ini memberikan panduan terperinci tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkesinambungan. Pasalnya, lingkungan merupakan kombinasi antara upaya untuk memperoleh keuntungan secara sah dengan kebutuhan pembangunan yang menghormati martabat manusia, kelangsungan lingkungan serta pekerjaan yang layak. Panduan ini juga menegaskan prinsip yang menyatakan: perusahaan yang berkesinambungan membutuhkan masyarakat yang berkesinambungan dan bisnis yang cenderung berkembang di dalam masyarakat berkembang, demikian pula sebaliknya. Kesimpulan-kesimpulan ini mengidentifikasi dan menguraikan 17 pilar lingkungan yang kondusif; menjelaskan enam karakteristik perusahaan yang berkesinambungan, serta memberi panduan kepada pemerintah, mitra sosial dan ILO tentang peran mereka dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan.

Kesimpulan-kesimpulan ini pun mengakui, dalam mengatasi tantangan dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan, kita perlu melandaskan kebijakan pada instrumen-instrumen yang menjadi pedoman Agenda Pekerjaan yang Layak ILO secara lebih luas serta panduan yang diuraikan dalam Agenda Dunia untuk Pekerjaan (Global Employment Agenda) yang menyediakan serangkaian kebijakan, termasuk kebijakan tentang pengembangan usaha—yang dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Kesimpulan-kesimpulan ini menempatkan pengembangan perusahaan yang berkesinambungan dalam konteks hubungan kebijakan secara lebih luas, termasuk melalui Program Nasional untuk Pekerjaan yang Layak dan reformasi PBB yang lebih luas.

Kesimpulan-kesimpulan juga berperspektif ke depan, dan diambil berdasarkan pemikiran terbaru tentang pengembangan yang berkesinambungan, perkembangan sektor swasta serta kewargaan perusahaan yang baik (*good corporate citizenship*). Oleh karena itu, kesimpulan-kesimpulan ini memberi nilai tambah dan panduan nyata. Para pengambil keputusan, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perusahaan-perusahaan dari segala skala serta siapa saja yang ingin mengatasi masalah kelangsungan multidimensional yang kita hadapi akan mendapati bahwa panduan yang diberikan dokumen ini sangat relevan dan bermanfaat.

José Manuel Salazar-Xirinachs

Direktur Eksekutif

Sektor Pekerja ILO

Ringkasan Kesimpulan

Komite Perusahaan yang Berkesinambungan Konferensi ILO 2007

Kondisi lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkesinambungan

1. Perdamaian dan stabilitas politik.
2. Tata pemerintahan yang baik.
3. Dialog sosial.
4. Menghormati hak asasi manusia secara universal.
5. Budaya wirausaha.
6. Kebijakan makro ekonomi yang efektif dan stabil.
7. Perdagangan dan integrasi perekonomian yang berkesinambungan.
8. Lingkungan hukum dan peraturan yang kondusif.
9. Ketentuan hukum dan hak kepemilikan yang dilindungi.
10. Persaingan yang adil.
11. Akses terhadap layanan keuangan.
12. Prasarana fisik.
13. Teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup.
15. Keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.
16. Perlindungan sosial yang memadai.
17. Tata lingkungan yang bertanggung jawab.

Peran pemerintah dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan

1. Memfasilitasi dan berpartisipasi dalam dialog sosial.
2. Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui administrasi ketenagakerjaan yang efisien, termasuk inspeksi tenaga kerja.
3. Mendorong konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela.
4. Mempromosikan pengadaan publik, pemberian pinjaman dan investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan.

5. Mempromosikan sektor dan rantai nilai.
6. Fleksibilitas dan perlindungan untuk mengelola perubahan.
7. Program-program sasaran.
8. Penelitian dan inovasi.
9. Akses terhadap layanan informasi, bisnis dan keuangan.
10. Koordinasi dan hubungan kebijakan.
11. Kebijakan-kebijakan internasional.
12. Pola produksi dan konsumsi.
13. Mendukung pengembangan keterampilan.

Peran mitra sosial dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan

1. Advokasi
2. Representasi
3. Layanan
4. Pelaksanaan kebijakan dan standar

Prinsip-prinsip di tingkat perusahaan untuk perusahaan yang berkesinambungan

1. Dialog sosial dan hubungan industri yang baik.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Kondisi pekerjaan.
4. Produktivitas, upah dan manfaat bersama.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Tata kelola perusahaan.

Kesimpulan tentang pengembangan perusahaan yang berkesinambungan

Pendahuluan

1. Terjadi perdebatan internasional secara luas dan mendalam tentang peran penting sektor swasta dan perusahaan-perusahaan berkesinambungan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, pekerjaan yang layak serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, Badan Pimpinan Kantor ILO memutuskan untuk memasukkan pengembangan perusahaan yang berkesinambungan dalam agenda Sidang ke-96 Konferensi ILO sebagai sarana untuk menciptakan pekerjaan yang layak dalam kerangka pengembangan berkesinambungan secara lebih luas.
2. Dalam Pertemuan Johannesburg 2002 komitmen dibuat untuk mempromosikan integrasi ketiga komponen pengembangan yang berkesinambungan–yakni pembangunan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan–sebagai pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pengentasan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkesinambungan, serta perlindungan dan pengelolaan basis sumber daya alam dari pembangunan ekonomi dan sosial menjadi tujuan luas dan persyaratan penting dari pengembangan yang berkesinambungan. Sistem internasional, termasuk ILO, belum membangun sinergi kuat antara kelangsungan sosial, lingkungan dan ekonomi. Akibatnya, hanya kemajuan kecil yang dicapai dalam pemusatan kebijakan termasuk hasil praktiknya.
3. Penciptaan penghasilan tergantung kepada interaksi produktif dari semua lapisan masyarakat. Perusahaan yang berkesinambungan tentu dapat menjadi sumber penting dari pertumbuhan, penciptaan penghasilan, kepegawaian dan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, pengembangan perusahaan yang berkesinambungan menjadi sarana penting untuk menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan standar hidup dan kondisi sosial dari waktu ke waktu. Pemerintah dan mitra sosial perlu bekerja sama untuk mempromosikan integrasi ketiga komponen pengembangan yang berkesinambungan– ekonomi, sosial dan lingkungan–sebagai pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. ILO secara khusus berada pada posisi untuk membantu pengembangan yang berkesinambungan melalui promosi pekerjaan yang layak, karena di tempat kerjalah dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan bersatu dan tidak terpisahkan.
4. Untuk mengatasi tantangan dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan, perlu dipertimbangkan instrumen-instrumen yang melandasi Agenda ILO yang lebih luas tentang Pekerjaan yang Layak. Konstitusi ILO, termasuk Deklarasi Philadelphia, serta Deklarasi ILO Tahun 1998 tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja serta Tindak-lanjutnya menegaskan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial adalah komponen penting dan saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan pengembangan yang berkesinambungan berbasis luas serta mempromosikan keadilan sosial. Agenda Pekerjaan Global ILO yang diterapkan oleh Badan Pimpinan ILO menyediakan serangkaian kebijakan, termasuk kebijakan tentang pengembangan usaha, yang dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

5. Mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan bisa menjadi upaya untuk memperkuat ketentuan hukum, lembaga dan sistem tata kelola yang mendukung usaha dan mendorongnya agar beroperasi dengan cara yang berkesinambungan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah lingkungan kondusif yang mampu meningkatkan investasi, kewirausahaan, hak-hak pekerja, penciptaan, pertumbuhan dan pemeliharaan perusahaan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan perusahaan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai jalur pengembangan yang menghormati nilai dan prinsip pekerjaan yang layak, martabat manusia dan kelangsungan lingkungan.
6. Mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa sumber daya manusia, keuangan dan alam dapat dikombinasikan secara adil untuk mencapai inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi, serta kebutuhan lain dalam mengembangkan usaha, manfaat yang akan dibagi secara adil dalam perusahaan dan masyarakat yang lebih luas. Upaya ini membutuhkan bentuk-bentuk kerja sama baru antara pemerintah, pelaku bisnis, pekerja dan masyarakat untuk memastikan bahwa mutu kehidupan dan pekerjaan yang ada sekarang dan di masa mendatang dapat dioptimalkan seraya melindungi kelangsungan bumi ini. Dalam hal ini, tripartisme, termasuk dialog sosial dan perundingan bersama, merupakan elemen yang penting.
7. Perusahaan yang berkesinambungan membutuhkan masyarakat yang berkesinambungan pula. Bisnis akan cenderung berkembang jika masyarakat berkembang dan demikian pula sebaliknya. Ini membutuhkan partisipasi sosial dan ekonomi serta kesetaraan dalam distribusi dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang berkesinambungan. Ia membutuhkan akses yang adil terhadap peluang wirausaha, layanan keuangan dan pasar tenaga kerja. Mendorong peluang ekonomi dan sosial bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung juga penting, termasuk kebutuhan untuk membantu remaja. Di samping itu kelangsungan usaha pun mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan publik dan kerangka hukum untuk mewujudkan janji masyarakat yang sejahtera, stabil dan adil.
8. Perusahaan-perusahaan wajib aktif agar dapat bertahan. Namun tidak dapat disangkal, dalam perekonomian yang aktif dan dinamis, sebagian perusahaan pasti akan mengadakan kontrak atau mengalami kegagalan dan ada proses keluar-masuk secara terus-menerus. Prinsip dan nilai pekerjaan yang layak memberikan bimbingan yang sama banyaknya, baik untuk perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak, mengalami kegagalan maupun perusahaan yang berhasil dan berkembang. Dalam hal ini, kebijakan tentang pasar tenaga kerja yang aktif dan perlindungan sosial menjadi sangat krusial untuk mengelola transisi yang efisien dan adil secara sosial dengan mempertimbangkan kondisi nasional.
9. Target Agenda Pekerjaan yang Layak dapat diterapkan secara universal. Tapi, tidak ada satu solusi yang cocok bagi semua desain dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan. Sehingga kebijakan perlu mengakui perbedaan kondisi suatu negara sesuai tingkat perkembangan, sumber daya dan kapasitas lembaga dari negara-negara tersebut tanpa mengurangi pentingnya standar kerja dan lingkungan. Di samping itu, perbedaan ukuran dan jenis perusahaan serta lokasinya dalam rantai nilai membutuhkan berbagai intervensi yang berbeda seraya mengakui bahwa usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan lapangan kerja. Pengembangan perusahaan yang berkesinambungan juga perlu memberi penekanan tertentu pada upaya untuk mendukung

transisi para pelaku perekonomian informal menjadi perekonomian formal serta memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada mencakup semua perusahaan dan pekerja.

Lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkesinambungan

10. Lingkungan yang kondusif untuk menciptakan dan mengembangkan atau mengubah perusahaan secara berkesinambungan akan mengombinasikan pencarian keuntungan secara sah—salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi—dengan kebutuhan pembangunan yang menghormati martabat manusia, kelangsungan lingkungan, dan pekerjaan yang layak.
11. Lingkungan kondusif untuk pengembangan usaha yang berkesinambungan terdiri dari berbagai faktor besar, di mana tingkat kepentingan relatifnya mungkin bervariasi pada tahap pengembangan yang berbeda dan dalam konteks budaya dan sosio-ekonomi yang berbeda pula. Namun, ada beberapa persyaratan dasar yang umumnya dianggap penting. Persyaratan-persyaratan yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain itu antara lain:
 - (1) *Perdamaian dan stabilitas politik.* Perdamaian dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama dalam menjaga pendirian dan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan, sementara peran dan konflik sipil menjadi faktor besar yang menghambat investasi dan pengembangan sektor swasta.
 - (2) *Tata pemerintahan yang baik.* Lembaga politik yang demokratis, entitas publik dan swasta yang transparan dan akuntabel, tindakan anti-korupsi yang efektif serta tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, merupakan persyaratan penting yang memungkinkan perekonomian pasar, perusahaan beroperasi dengan cara yang baik dan lebih tanggap terhadap nilai serta target masyarakat secara jangka panjang.
 - (3) *Dialog sosial.* Dialog sosial yang didasarkan pada kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama, termasuk melalui kerangka hukum dan kelembagaan, sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif, adil dan saling menguntungkan bagi pemerintah, pengusaha, pekerja maupun masyarakat secara lebih luas.
 - (4) *Menghormati hak asasi manusia secara universal dan standar perburuhan internasional.* Daya saing perlu dibangun berdasarkan nilai. Menghormati hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional, terutama kebebasan berserikat dan perundingan bersama, penghapusan perburuhan anak, kerja paksa dan segala bentuk diskriminasi, merupakan ciri-ciri khusus masyarakat yang telah berhasil mengintegrasikan kelangsungan dengan pekerjaan yang layak.
 - (5) *Budaya wirausaha.* Pemerintah, pengakuan masyarakat atas peranan perusahaan dalam pembangunan serta dukungan baik dari sektor publik maupun swasta untuk kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan konsep bimbingan, terutama untuk perusahaan yang baru berdiri, perusahaan berskala kecil maupun kelompok-kelompok sasaran seperti perempuan dan remaja, menjadi faktor penentu penting dari lingkungan bisnis yang kondusif. Menghormati hak-hak pekerja harus dimasukkan dalam program yang ditargetkan dalam budaya wirausaha.

- (6) *Kebijakan makro ekonomi yang efektif dan stabil serta pengelolaan ekonomi yang baik.* Kebijakan moneter, keuangan dan nilai tukar harus menjamin kondisi ekonomi yang stabil dan dapat diperkirakan. Pengelolaan ekonomi yang efektif harus mengimbangi dua tujuan, yakni menciptakan peluang kerja yang lebih banyak dengan memerangi inflasi serta menyusun kebijakan dan peraturan yang mampu meningkatkan investasi jangka panjang yang produktif. Perhatian juga harus diberikan pada upaya untuk meningkatkan permintaan rata-rata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi nasional. Untuk negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang kurang berkembang, menciptakan kondisi ekonomi makro yang efektif memerlukan dukungan tegas dari masyarakat internasional melalui fasilitas keringanan hutang dan bantuan pembangunan resmi.
- (7) *Perdagangan dan integrasi perekonomian yang berkesinambungan.* Tingkat pembangunan negara yang berbeda perlu dipertimbangkan untuk menghapus hambatan terhadap pasar domestik dan luar negeri. Hasil-hasil efisiensi yang disebabkan oleh integrasi perdagangan dapat menghasilkan dampak pekerjaan yang positif dalam kuantitas atau kualitas pekerjaan termasuk kombinasi keduanya. Namun, karena integrasi perdagangan juga dapat menyebabkan dislokasi pekerjaan, informalitas yang lebih besar serta memperbesar jurang perbedaan penghasilan, maka beberapa tindakan perlu diambil pemerintah setelah berkonsultasi dengan mitra sosial. Tujuannya agar lebih mampu menilai dan mengatasi dampak ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dari kebijakan perdagangan. Beberapa tindakan juga diperlukan di tingkat regional dan multilateral untuk menghapus distorsi perdagangan dan membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam meningkatkan kapasitas untuk mengeksport produk-produk bernilai tambah, mengatur perubahan serta mengembangkan basis industri yang kompetitif.
- (8) *Hukum dan peraturan yang kondusif.* Peraturan yang dirancang secara buruk dan hambatan birokratif yang tidak perlu terhadap bisnis dapat membatasi pengembangan usaha baru dan kelangsungan pengoperasian perusahaan-perusahaan yang ada, juga menimbulkan informalitas, korupsi dan hilangnya efisiensi. Sedangkan peraturan yang dirancang dengan baik, transparan, akuntabel dan dikomunikasikan dengan baik, termasuk peraturan yang mempertahankan standar kerja dan lingkungan hidup, sangat baik untuk pasar dan masyarakat. Peraturan-peraturan ini memfasilitasi formalisasi dan meningkatkan daya saing yang sistematis. Namun, reformasi peraturan dan penghapusan hambatan bisnis tidak boleh merusak standar-standar ini.
- (9) *Ketentuan hukum dan menjamin hak kepemilikan.* Sistem hukum formal dan efektif yang menjamin semua orang dan perusahaan, kontrak yang dihormati dan ditegakkan, ketentuan hukum yang dihormati dan hak-hak kepemilikan dijamin, merupakan syarat penting yang tidak hanya bisa menarik investasi, tapi juga memberi kepastian, menjaga kepercayaan dan keadilan di tengah masyarakat. Properti lebih dari sekadar kepemilikan. Karenanya memperluas hak-hak kepemilikan dapat menjadi sarana pemberdayaan dan dapat memfasilitasi akses terhadap kredit dan permodalan. Ia juga mengharuskan perlunya mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan masyarakat.
- (10) *Persaingan yang adil.* Peraturan tentang kompetisi perlu dibuat untuk sektor swasta yang mencakup upaya untuk menghormati standar kerja dan sosial secara universal, dan untuk menghapus praktik-praktik anti-kompetitif di tingkat nasional.

- (11) *Akses terhadap layanan keuangan.* Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat membantu memperlancar sektor swasta yang dinamis dan berkembang sehingga mempermudah UKM, termasuk koperasi dan perusahaan-perusahaan baru, memperoleh dana, misalnya, melalui kredit, sewa, permodalan ventura atau jenis-jenis instrumen lain atau sejenis. Cara dan metode ini dapat menciptakan kondisi yang tepat untuk mendirikan usaha yang lebih inklusif. Lembaga keuangan, terutama lembaga multilateral dan internasional, perlu didorong untuk memasukkan pekerjaan yang layak dalam praktik pemberian pinjaman.
- (12) *Prasarana fisik.* Kelangsungan usaha dan pengembangan sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas prasarana fisik yang tersedia, seperti sarana fisik untuk perusahaan, sistem transportasi, sekolah dan rumah sakit. Akses yang dapat diandalkan dan terjangkau terhadap sumber air dan energi masih menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Perusahaan akan sangat terbantu oleh akses lokal ke industri-industri pendukung seperti penyedia jasa, serta pemasok dan produsen mesin.
- (13) *Teknologi informasi dan komunikasi.* Memperluas akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan penting lainnya di era ekonomi pengetahuan. Oleh karena itu, pemakaian teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal penting dalam mengembangkan perusahaan yang berkesinambungan dan perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Teknologi *broad-band* yang terjangkau juga menjadi hal signifikan bagi negara dan perusahaan, sehingga perlu difasilitasi.
- (14) *Pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup.* Bakat yang dimiliki seseorang adalah faktor tunggal yang produktif dan paling penting dalam perekonomian dewasa ini. Memfokuskan perhatian pada upaya untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil serta perluasan kemampuan manusia melalui sistem pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup bermutu tinggi sangat penting untuk membantu para pekerja dalam memperoleh pekerjaan yang baik dan membantu perusahaan memperoleh pekerja terampil yang dibutuhkan. Bantuan keuangan juga harus disediakan agar dapat meningkatkan akses pekerja miskin untuk memperoleh pelatihan dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai tujuan ganda yaitu keberhasilan ekonomi dan kemajuan sosial.
- (15) *Keadilan sosial dan partisipasi sosial.* Ketidaksetaraan dan diskriminasi sangat tidak sesuai dengan pengembangan usaha yang berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan eksplisit tentang keadilan sosial, partisipasi sosial dan kesetaraan kesempatan kerja sangat dibutuhkan. Pelaksanaan secara efektif atas hak berserikat dan perundingan bersama juga menjadi sarana yang efektif untuk memastikan distribusi yang adil atas hasil produktivitas dan upah yang memadai bagi para pekerja.
- (16) *Perlindungan sosial yang memadai.* Model pengaman sosial universal yang berbasis pajak dan berkesinambungan atau model pengaman nasional lain yang menyediakan akses kepada warga masyarakat terhadap layanan-layanan penting seperti kesehatan yang bermutu, tunjangan untuk pengangguran, perlindungan persalinan serta pensiun pokok, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peralihan ke perekonomian formal. Melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja juga merupakan hal yang penting untuk mengembangkan usaha yang berkesinambungan.

- (17) *Tata lingkungan yang bertanggung jawab.* Apabila tidak ada peraturan atau insentif yang sesuai, pasar mungkin akan menciptakan lingkungan yang tidak diinginkan. Peraturan dan insentif pajak, termasuk tata cara pengadaan publik, harus dimanfaatkan untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan yang berkesinambungan. Solusi-solusi berbasis pasar swasta, seperti pemakaian kriteria lingkungan dalam menilai risiko kredit atau kinerja investasi, juga merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi tantangan ini.

Praktik yang bertanggung jawab dan berkesinambungan di tingkat perusahaan

12. Di tingkat perusahaan, kelangsungan berarti mengoperasikan bisnis untuk berkembang dan memperoleh keuntungan. Selain itu juga pengakuan atas aspirasi ekonomi dan sosial masyarakat di dalam maupun di luar organisasi di mana perusahaan tergantung kepadanya, serta dampaknya terhadap lingkungan. Kelangsungan jangka panjang melandaskan pengelolaan perusahaan harus didasari pada tiga pilar kelangsungan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan perusahaan menciptakan penghasilan dan pekerjaan yang layak.
13. Perusahaan yang berkesinambungan perlu mencari inovasi, menerapkan teknologi ramah lingkungan yang sesuai, mengembangkan keterampilan dan sumber daya manusia, serta meningkatkan produktivitas agar tetap dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Perusahaan-perusahaan ini juga perlu menerapkan praktik-praktik di tempat kerja dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental, hak-hak di tempat kerja, standar-standar perburuhan internasional serta menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan pihak manajemen sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan yang layak. Prinsip-prinsip berikut ini dapat diterapkan pada semua perusahaan:
- (1) *Dialog sosial dan hubungan industri yang baik.* Perusahaan yang berkesinambungan terlibat dalam dialog sosial dan hubungan industri yang baik, seperti perundingan bersama, pemberian akses informasi, konsultasi dan partisipasi pekerja. Ini adalah instrumen-instrumen yang efektif untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan, karena mampu mempromosikan nilai-nilai bersama, kepercayaan dan kerja sama, serta perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Dialog sosial mencakup contoh-contoh di tingkat internasional, seperti kesimpulan Perjanjian Kerangka Kerja Internasional antara perusahaan multinational dengan federasi serikat pekerja dunia di berbagai sektor industri. Dialog sosial mendukung penerapan strategi investasi jangka panjang dengan tanggung jawab sosial. Ia dapat membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, ekuitas, keadilan dan pengembangan keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dan kebutuhan para pekerja dalam memperoleh keterampilan yang diakui dan dapat dialihkan.
 - (2) *Pengembangan sumber daya manusia.* Pengembangan sumber daya manusia di perusahaan yang berkesinambungan harus berdasarkan pada dialog sosial dan partisipasi pekerja. Perusahaan yang berkesinambungan menganggap pekerja terampil sebagai sumber keunggulan kompetitif yang utama dan menganggap pekerja sebagai aset dan agen perubahan. Pengembangan keterampilan dan kompetensi terkait serta pemakaiannya secara

efektif akan memastikan tingginya produktivitas dan daya saing perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan menentukan keterampilan yang mereka butuhkan, melakukan investasi di bidang pelatihan untuk para pekerja dan manajer, mempromosikan budaya pembelajaran seumur hidup dan inovasi, mendorong pembelajaran di tempat kerja serta memfasilitasi upaya untuk berbagi pengetahuan. Pekerja perlu memanfaatkan peluang untuk memperoleh pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup. Pengembangan keterampilan dan kompetensi akan memastikan kemampuan kerja para pekerja dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan organisasi kerja. Perusahaan yang berkesinambungan memasukkan pengembangan sumber daya manusia dalam strategi bisnisnya dengan menghormati hubungan kerja dan menyediakan perlakuan yang setara kepada pekerja laki-laki maupun perempuan dalam mengembangkan keterampilan, kompetensi dan produktivitasnya.

- (3) *Kondisi kerja.* Perusahaan yang berkesinambungan menawarkan kondisi kerja yang menyediakan lingkungan kerja aman dan menarik dengan organisasi kerja yang fleksibel dan saling menguntungkan. Ia menerapkan praktik-praktik kerja yang bebas diskriminasi, pelecehan dan intimidasi. Selain itu juga mempromosikan kesetaraan gender dan kesempatan yang adil serta perlakuan adil terhadap kelompok-kelompok rentan. Perusahaan menerapkan praktik-praktik kerja yang mampu memelihara keseimbangan yang berkesinambungan antara pekerjaan, kehidupan dengan keluarga, serta mengakui peran perempuan dalam pengembangan yang berkesinambungan. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman, sehat, dan memungkinkan pekerja memberikan kontribusi untuk perubahan dan perkembangan. Perusahaan yang berkesinambungan juga menghormati standar-standar kerja yang relevan termasuk usia minimal untuk bekerja, menolak bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak, menolak kerja paksa dan, jika ada, mengatasi masalah TBC, malaria, HIV/AIDS dan penyakit kronis lain yang mengancam kehidupan. Dalam konteks ini, Kode Etik ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja bisa menjadi titik acuan yang penting. Perusahaan mengakui bahwa praktik-praktik ini dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat inovasi dan daya saing perusahaan.
- (4) *Produktivitas, upah dan keuntungan bersama.* Para pekerja perlu berpartisipasi dalam keberhasilan perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan yang adil dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini akan membantu distribusi yang lebih adil atas penghasilan dan keuntungan. Sarana penting untuk mencapainya adalah melalui perundingan bersama dan dialog sosial.
- (5) *Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).* Perusahaan yang berkesinambungan dapat menggunakan CSR untuk melengkapi upaya dalam mencari strategi dan hasil yang berkesinambungan. CSR adalah inisiatif sukarela yang digerakkan bisnis dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dianggap melebihi kepatuhan hukum. CSR tidak dapat menggantikan peraturan yang sah, penegakan hukum dan perundingan bersama. Namun, apabila CSR transparan dan dapat dipercaya serta didasari pada kemitraan sejati, maka CSR dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada pekerja dan *stakeholder* lain untuk melibatkan perusahaan guna menghasilkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan-kegiatan mereka. Dalam hal ini, inisiatif etis dan perdagangan yang adil membantu mempromosikan CSR dalam rantai nilai. Deklarasi Prinsip Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinational dan Kebijakan Sosial (Deklarasi MNE) dan Panduan OECD tentang Perusahaan Multinational bisa memberikan panduan tentang perilaku dan kriteria korporat yang baik.

- (6) *Tata kelola perusahaan dan praktik bisnis.* Tata kelola perusahaan dan praktik bisnis yang baik didasari pada beberapa nilai, misalnya akuntabilitas, keadilan dan transparansi, menghormati ketentuan hukum dan prinsip-prinsip fundamental serta hak-hak di tempat kerja. Prinsip-prinsip perusahaan yang berkesinambungan harus dipromosikan di samping rantai pasokan. Perusahaan yang berkesinambungan menerapkan standar dan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan, memastikan insentif, sistem dan tanggung jawab manajemen yang tepat, serta konsultasi di tempat kerja.
14. Perusahaan yang berkesinambungan harus memiliki komitmen tegas untuk mematuhi undang-undang yang memengaruhi operasional serta peraturan yang mengatur hubungan mereka dengan masyarakat. Ia membantu masyarakat untuk menghapus korupsi serta meningkatkan transparansi.

Peran pemerintah

15. Ada tiga peran pemerintah dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan yaitu:
- (1) Menciptakan lingkungan kondusif dengan memastikan kondisi dasar bagi pengembangan usaha yang berkesinambungan termasuk melalui pelaksanaan dan penerapan standar-standar kerja dan lingkungan.
 - (2) Membuat program dan kebijakan secara proaktif untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dalam mengembangkan dan berperilaku secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Misalnya, melalui penyuluhan tentang contoh praktik-praktik terbaik.
 - (3) Bertindak sebagai perusahaan yang berkesinambungan, baik sebagai majikan maupun produsen barang dan jasa, bila ada.
16. Pemerintah dapat berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan promotor perusahaan yang berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan praktik, seperti:
- (1) *Memfasilitasi dan berpartisipasi dalam dialog sosial.* Dialog sosial, kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama merupakan sarana relevan dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan dan harus diperluas agar bisa mencakup semua sektor perekonomian.
 - (2) *Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui administrasi tenaga kerja yang efisien, termasuk sistem inspeksi tenaga kerja.* Peraturan dan kebijakan tenaga kerja yang dirancang dengan baik sangat penting untuk mengembangkan perusahaan yang berkesinambungan. Pemerintah perlu melaksanakan dan menegakkan undang-undang tenaga kerja melalui sistem administrasi tenaga kerja dan inspeksi tenaga kerja dari sumber yang baik. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan dan penegakan undang-undang perlu dijadikan bahan kajian. Perhatian khusus juga harus diberikan untuk memperluas cakupan undang-undang tenaga kerja ke semua pekerja, terutama perempuan dan laki-laki yang bekerja di sektor perekonomian informal atau pekerja yang memiliki hubungan kerja terselubung.
 - (3) *Mendorong konsep sukarela dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).*

Pemerintah perlu mempromosikan, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang CSR, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus UKM, serta membantu upaya-upaya yang dilakukan mitra sosial untuk bersama-sama mengatasi masalah CSR.

- (4) *Mempromosikan pengadaan publik, pemberian pinjaman dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.* Pemerintah perlu mempromosikan standar-standar sosial dan lingkungan dalam program pengadaan publik dan investasi serta dalam kebijakan pemberian pinjaman, termasuk di tingkat bilateral maupun multilateral. Pemerintah juga perlu memperkuat dan menegakkan budaya menghormati hak-hak pekerja dengan memberikan contoh yang kuat, serta mempromosikan praktik-praktik lingkungan yang efektif.
- (5) *Mempromosikan sektor dan rantai nilai.* Pemerintah sering mempromosikan investasi di sektor-sektor tertentu dan terlibat dalam inisiatif kebijakan industri penting untuk meningkatkan pertumbuhan pekerjaan. Kebijakan-kebijakan ini perlu sepenuhnya mencakup tujuan sosial dan lingkungan, mempertimbangkan semua rantai nilai, tidak mengganggu atau menahan inisiatif investasi domestik, termasuk memperlemah hak-hak pekerja.
- (6) *Fleksibilitas dan perlindungan untuk mengatur perubahan.* Perekonomian dan perusahaan yang berkesinambungan perlu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi secara cepat di pasar. Untuk membantu perusahaan dan pekerja menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan ini, pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum dan lembaga, termasuk peraturan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, kebijakan tentang pasar tenaga kerja yang aktif dan layanan pekerjaan efektif yang juga membantu meningkatkan kapasitas perusahaan untuk beradaptasi. Kebijakan ini perlu dikembangkan setelah berkonsultasi penuh dengan mitra sosial.
- (7) *Program-program sasaran.* Pemerintah perlu mempromosikan program-program pengembangan usaha yang berkesinambungan dan mendorong budaya kewirausahaan yang berkesinambungan dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok perempuan, remaja dan kelompok yang kurang beruntung, baik di sektor atau bidang tertentu.
- (8) *Penelitian dan inovasi.* Pemerintah perlu memfasilitasi investasi di bidang penelitian dan pengembangan untuk mempromosikan kemitraan akademis, alih teknologi dan inovasi dalam mengembangkan usaha yang berkesinambungan. Di samping itu, semua perusahaan perlu dibantu dengan akses yang baik terhadap lembaga-lembaga penelitian agar bisa membantu mereka berkembang melalui inovasi.
- (9) *Akses terhadap informasi, serta layanan bisnis dan keuangan.* Pemerintah perlu menyediakan mekanisme dan kerangka kerja yang tepat untuk mengumpulkan dan memberikan penyuluhan tentang informasi terkait serta menyediakan layanan bagi para pengusaha dan pekerja sehingga dapat mengurangi hambatan informasi. Upaya ini mencakup informasi dan layanan yang dirancang untuk membantu memahami peraturan dan prosedur tentang perusahaan dan hak-hak pekerja, serta memfasilitasi akses terhadap layanan kredit dan layanan keuangan lain, terutama untuk usaha mikro, kecil dan usaha kecil menengah. Informasi juga perlu mencakup contoh praktik-praktik terbaik dalam mencapai tujuan pekerjaan yang layak.
- (10) *Hubungan dan koordinasi kebijakan.* Hubungan antara kebijakan dan kerja sama dalam pemerintahan perlu dilakukan, karena kebutuhan perusahaan yang berkesinambungan melampaui batas kementerian lini. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan koordinasi

dan kerja sama yang efektif dalam pemerintahan.

- (11) *Kebijakan internasional.* Ada dimensi internasional penting dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan. Dimensi ini membutuhkan perumusan kebijakan yang efektif di tingkat internasional di bidang perdagangan, keuangan, keringanan hutang, investasi, migrasi tenaga kerja, serta dimensi sosial dan lingkungan global, termasuk dalam hubungan antar kebijakan-kebijakan ini.
- (12) *Pola produksi dan konsumsi.* Pemerintah berperan melaksanakan kebijakan untuk mendorong bentuk-bentuk produksi dan konsumsi yang lebih berkesinambungan.
- (13) *Membantu pengembangan keterampilan.* Di dunia global yang pesat ini, peningkatan investasi pemerintah dalam permodalan sumber daya manusia, melalui sistem pendidikan, pelatihan yang non-diskriminatif dan bermutu tinggi serta pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk memfasilitasi pasar tenaga kerja bagi semua kelompok, termasuk untuk meningkatkan produktivitas dan mutu pekerjaan. Keterampilan yang diperoleh harus diakui dan mampu menjawab perubahan secara terus-menerus dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja serta memberi kontribusi terhadap pengembangan pribadi, serta mampu mengakses budaya dan kewarganegaraan secara aktif. Keterlibatan mitra sosial juga penting. Pelatihan kejuruan dan memfasilitasi mobilitas para pekerja penting dalam struktur produksi dan pekerjaan yang baru berkembang. Reformasi sistem pendidikan, pelatihan kejuruan dan pengembangan skema-skema sekolah-pekerjaan, dapat berfungsi sebagai faktor penggerak untuk melestarikan budaya wirausaha. Pemerintah perlu berinvestasi dan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengurangi buta huruf dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan di semua tingkatan serta meningkatkan sistem pendidikan secara terus-menerus.

Peran mitra sosial

17. Pengusaha, pekerja dan organisasi-organisasi mereka memainkan peran penting dalam membantu pemerintah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan. Mekanisme tripartit, bipartit dan dialog sosial yang efektif menjadi faktor penting dalam mengembangkan usaha yang berkesinambungan. Mitra sosial dapat memainkan peranan efektif melalui:
 - (1) *Advokasi.* Hubungan yang saling memperkuat antara pekerjaan layak, pengembangan berkesinambungan dan pengembangan perusahaan yang berkesinambungan, harus didukung oleh partisipasi mitra sosial di tingkat nasional untuk menganjurkan dan merancang kebijakan dan peraturan yang tepat guna mendorong pengembangan usaha yang berkesinambungan.
 - (2) *Representasi.* Mitra sosial memainkan peran penting dalam menjangkau para pekerja dan pemilik perusahaan—secara khusus, mereka yang berasal dari UKM dan perekonomian informal, dan secara umum, meningkatkan representasi keanggotaannya—guna memastikan manfaat yang lebih dalam dan luas dari asosiasi, representasi dan kepemimpinan, termasuk di bidang advokasi kebijakan publik, perumusan serta pelaksanaannya.

- (3) *Layanan*. Mitra sosial menyediakan berbagai jenis layanan penting bagi anggotanya yang mempunyai dampak besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan. Ini termasuk pengetahuan manajemen, pelatihan, peningkatan kesadaran, nasihat dan panduan tentang cara mengakses layanan publik dan swasta, hubungan dengan sumber penelitian dan konsultasi, dan nasihat tentang praktik-praktik inovatif di tempat kerja. Di samping itu, mitra sosial juga berperan dalam menyediakan informasi tentang praktik yang baik dalam perundingan bersama dan berbagi informasi tentang CSR.
- (4) *Pelaksanaan kebijakan dan standar*. Mitra sosial berperan penting memberi dampak terhadap pekerjaan yang layak, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan standar dan kebijakan tenaga kerja tentang pengembangan sumber daya manusia. Sebagai contoh, mitra sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional maupun perusahaan, termasuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan HIV/AIDS di dunia kerja.

Peran ILO

18. Tugas ILO dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan harus didasari pada mandat, anggaran dan keunggulan komparatif, serta tugas untuk menyusun standar khusus berdasarkan Agenda Pekerjaan yang Layak. Ini juga perlu didasari sepenuhnya pada struktur tripartit dan hubungan dengan dunia pekerjaan secara nyata melalui perwakilan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, budaya yang kuat dalam mengembangkan dialog sosial dan kerangka kerja normatif sebagai sebuah organisasi yang menetapkan standar.
19. ILO perlu mempromosikan ratifikasi dan penerapan konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional serta mempromosikan penerapan rekomendasi yang terkait dengan pengembangan perusahaan yang berkesinambungan (lihat lampiran).
20. Kantor ILO perlu bekerja sama dengan para konstituen ILO secara berkesinambungan agar dapat menilai apakah praktiknya saat ini berdasarkan kesimpulan ini, termasuk di antaranya:
 - (1) Sentralitas Agenda Pekerjaan yang Layak terhadap praktik kerja sama.
 - (2) Perlunya meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil program.
 - (3) Kesesuaian program-program perusahaan yang berkesinambungan dengan DWCP untuk memastikan program-program tersebut sesuai dengan prioritas dan kondisi lokal.
 - (4) Kajian struktur di lapangan yang perlu memberi peluang untuk meningkatkan pelaksanaan dan mutu program-program perusahaan yang berkesinambungan.
 - (5) Pentingnya partisipasi penuh dari para konstituen dalam kegiatan-kegiatan ILO.

Dalam intervensinya, ILO harus fokus pada respons praktis dan berdasarkan permintaan seperti sarana, metodologi dan berbagi pengetahuan yang memiliki nilai praktis bagi mitra sosial dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

21. Menciptakan perusahaan yang berkesinambungan merupakan elemen penting dalam mencapai hasil pekerjaan layak. Tugas ILO dalam mengembangkan usaha yang berkesinambungan selalu

didasari pada Agenda Pekerjaan Global yang—seperti halnya pilar pekerjaan dari Agenda Pekerjaan yang Layak—menyediakan panduan tentang penciptaan pekerjaan yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Dalam hal ini, program harus dikoordinasikan dengan ketiga tujuan lain yang strategis yaitu hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan dialog sosial.

22. Tujuan pekerjaan layak bersifat universal. Namun karena kebijakan dan praktik dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan bervariasi dari satu negara ke negara lain dan mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda pula, ILO perlu menyediakan sarana bantuan praktis yang spesifik sesuai dengan keadaan untuk pemerintah dan mitra sosialnya. Program-program pelatihan perlu dikembangkan dan dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Internasional (International Training Centre) ILO. Pusat ini harus memfokuskan tugasnya di bidang program-program pengembangan perusahaan pada elemen-elemen penting dari kelangsungan dan pekerjaan yang layak.
23. ILO perlu mengadakan penelitian dan pengembangan kebijakan untuk mempromosikan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak serta bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional terkait agar dapat memberikan keahliannya pada hubungan antara pekerjaan dan makro ekonomi dengan masalah perdagangan. ILO juga perlu membantu negara-negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan tentang perkembangan industri agar dapat menciptakan perusahaan yang berkesinambungan.
24. DWCP merupakan mekanisme utama kerja sama ILO dengan para konstituen di seluruh dunia. Setiap DWCP mengatur kerja sama ILO dalam kerangka kerja terkait yang secara efektif memungkinkan negara anggota memperoleh kemajuan dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Tugas Kantor ILO dalam mengembangkan perusahaan yang berkesinambungan adalah dengan memberikan bantuan terkait secara langsung pada strategi-strategi dalam DWCP. Bantuan ini perlu diupayakan agar dapat membantu:
 - (1) *Memperkuat kapasitas pemerintah dan mitra sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan yang berkesinambungan.* ILO perlu membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan peraturan yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan secara berkesinambungan sehingga mendukung pertumbuhan dalam perekonomian formal dan memastikan dihormatinya hak-hak pekerja dan kesetaraan gender. Dalam hal ini ILO perlu membantu pemerintah dan mitra sosial melalui:
 - (a) Pengembangan sumber, sarana dan metodologi informasi untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkesinambungan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar tenaga kerja serta kondisi ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
 - (b) Pemberian panduan tentang cara-cara di mana kebijakan dan peraturan dapat membantu penciptaan kondisi kerja yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan yang berkesinambungan, transisi dari perekonomian informal ke perekonomian formal serta perkembangan ekonomi dan sosial.
 - (c) Pemberian panduan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota agar mereka dapat menyusun statistik yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk membantu mengevaluasi penciptaan lapangan kerja yang layak melalui perusahaan yang berkesinambungan.

- (d) Pengumpulan dan penyuluhan informasi tentang hubungan antara kebijakan yang mampu mengatasi masalah-masalah sosial dewasa ini, seperti masalah jender dan kebutuhan untuk memberdayakan perempuan, serta pengembangan perusahaan yang berkesinambungan.
 - (e) Pemberian bantuan kepada organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja untuk mempromosikan hak-hak pekerja, menutup jurang kesenjangan serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menganalisa dinamika bisnis dan lingkungan kerja agar dapat membantu pengembangan perusahaan yang berkesinambungan.
 - (f) Pemberian bantuan teknis untuk membantu perusahaan-perusahaan baru, mikro dan kecil serta usaha kecil menengah agar mampu bertahan melalui, misalnya, jaringan kerja, peningkatan kemampuan dan kompetensi para pekerja, serta peningkatan dan pengelompokan rantai nilai di tingkat regional maupun global.
- (2) *Peningkatan dan pengelompokan rantai nilai.* ILO perlu membantu pemerintah dan mitra sosial dalam mengembangkan dan meningkatkan kelompok atau sektor yang berpotensi menciptakan perusahaan yang berkesinambungan serta pekerjaan yang layak. Secara khusus, ILO perlu mengadakan penelitian dan analisa agar bisa mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengembangkan strategi-strategi yang dapat memanfaatkan peluang-peluang ini.
- (3) *Strategi pengembangan lokal.* ILO perlu memberikan bantuan melalui penelitian pelatihan, berbagi pengetahuan dan proyek-proyek kerja sama teknis kepada pemerintah dan mitra sosial dalam merancang dan melaksanakan strategi-strategi di tingkat sub-nasional yang mampu membantu menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan pekerjaan yang layak. Strategi-strategi ini terkait secara khusus di daerah-daerah di mana sektor perekonomian besar, industri tradisional mengalami tekanan kompetitif, lingkungan, dan peluang-peluang baru untuk dikembangkan, penciptaan lapangan kerja, termasuk dalam situasi-situasi pascakrisis.
- (4) *Penerapan praktik-praktik kerja yang bertanggung jawab dan berkesinambungan di tempat kerja.* ILO perlu membantu dokumentasi, penyuluhan dan mereplikasi praktik-praktik yang baik di tempat kerja di tingkat nasional, sektoral dan perusahaan serta menggunakan keahliannya untuk membantu perusahaan yang menerapkan praktik-praktik yang tidak berkesinambungan agar dapat menerapkan praktik yang berkesinambungan. Panduan khusus perlu diberikan terhadap perusahaan untuk mempromosikan praktik-praktik yang bertanggung jawab di tempat kerja di samping rantai pasokan, termasuk melalui penggunaan Deklarasi MNE. Ini mencakup upaya untuk memasukkan konsep pekerjaan yang layak, peran organisasi pengusaha dan pekerja, pentingnya hak-hak pekerja serta kasus bisnis untuk praktik yang berkesinambungan ke dalam program-program pengembangan usaha yang lebih luas. ILO perlu memberikan keahliannya untuk menciptakan hubungan dan kemitraan antara pekerja dengan manajemen guna mencapai produktivitas dan kondisi kerja yang lebih baik. Program-program ini perlu mencakup pelatih dan materi yang dirancang untuk manajer perusahaan, perwakilan, serta pekerja untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dialog sosial dan perundingan bersama, serta memastikan bahwa pengusaha diperkenalkan dengan konsep pekerjaan yang layak, peran serikat pekerja dan pentingnya menghormati hak-hak pekerja dalam program-program pelatihan ILO untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri.

- (5) *Program-program sasaran untuk kelompok khusus dan kelompok marjinal.* Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan usaha yang berkesinambungan berskala mikro, kecil dan menengah, promosi koperasi, kemampuan kerja para remaja dan pekerjaan kewirausahaan (termasuk kurikulum sekolah), pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan, serta program-program kewirausahaan untuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Perhatian khusus diperlukan terkait perekonomian informal. ILO dengan memberikan panduan tentang hubungan antara peraturan dan informalitas, kondisi kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta program-program pengembangan yang mendukung transisi perekonomian informal menjadi perekonomian formal.
- 25.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, ILO perlu menggunakan keunggulan komparatifnya untuk meraih keberhasilan yang lebih besar dengan menciptakan kemitraan agar dapat mempromosikan Agenda Pekerjaan yang Layak bersama lembaga dan badan PBB yang lain (terutama dalam konteks reformasi PBB), termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Program Lingkungan Hidup PBB, untuk memastikan konsistensi dan menghindari kesamaan upaya yang ada. ILO juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga Bretton Woods serta lembaga keuangan internasional dan regional lainnya, Organisasi Kerja Sama dan Perkembangan Ekonomi, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kalangan akademisi serta mitra-mitra terkait lainnya yang terlibat dalam mempromosikan perusahaan yang berkesinambungan dan pekerjaan yang layak. ILO perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, multilateral dan bilateral untuk memastikan praktik pengadaan dan pemberian pinjaman secara berkesinambungan yang memperlihatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam standar-standar perburuhan internasional dan Deklarasi MNE. Di samping itu, ILO juga perlu mempertimbangkan kerja sama dengan lembaga dan badan lain dalam naungan PBB serta organisasi-organisasi eksternal untuk mengembangkan modul-modul tentang masalah pekerjaan yang layak, sosial dan lingkungan, untuk dimasukkan dalam kurikulum untuk perusahaan-perusahaan bisnis yang baru.
- 26.** Akibat proliferasi yang semakin besar dari standar-standar swasta CSR yang berbeda, ILO perlu mempromosikan pembahasan lebih lanjut dengan para konstituen tentang cara mencapai pendekatan yang saling berhubungan.
- 27.** Di samping itu, dalam parameter program dan anggaran, Kantor ILO perlu mengembangkan basis pengetahuannya tentang masalah-masalah yang muncul (misalnya, melalui penelitian di bidang-bidang tertentu sebagai penghubung antara kelangsungan, dampak dari perubahan iklim terhadap perusahaan dan pekerjaan), memfasilitasi pembagian pengetahuan dan praktik lintas negara (melalui, misalnya, situs web dan basis data tentang persoalan tersebut sebagai kesepakatan bersama dan hubungan industri serta lingkungan yang kondusif bagi perusahaan yang berkesinambungan) serta memperkuat program-program kerja sama teknisnya.

Lampiran

Instrumen-instrumen ILO yang terkait dengan pengembangan perusahaan yang berkesinambungan mencakup:

I. Konvensi

Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 tentang Inspeksi Tenaga Kerja

Konvensi ILO No. 94 Tahun 1949 tentang Klausul Tenaga Kerja (Kontrak Publik)

Konvensi ILO No. 135 Tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja

Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 tentang Perlindungan Persalinan

II. Rekomendasi

Rekomendasi ILO No. 189 Tahun 1998 tentang Penciptaan Lapangan Kerja UKM

Rekomendasi ILO No. 193 Tahun 2002 tentang Promosi Koperasi

Rekomendasi ILO No. 195 tahun 2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekomendasi ILO No. 198 tahun 2006 tentang Hubungan Kerja